

ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN BERDASARKAN  
HASIL SURVEI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK  
DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK



Disusun Oleh  
YAYAT HERYATN, SP, MPS  
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT  
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA - INSTITUT  
PERTANIAN BOGOR  
TAHUN 2022

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Perkembangan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, konsumsi pangan penduduk merupakan pondasi ketahanan pangan yang harus selalu dipantau secara rutin oleh instansi pemerintah yang membidangi pembangunan ketahanan pangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk analisis situasi konsumsi pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut di atas, pada tahun anggaran 2022, Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Lebak secara khusus telah melaksanakan kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak yang diselenggarakan pada tahun 2021. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan dan program ketahanan pangan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan wilayah menuju pencapaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan.

Secara umum tujuan kajian ini adalah menganalisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan hasil Survei Konsumsi Pangan. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH); dan 2) Menganalisis disparitas situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak.

Desain analisis yang digunakan adalah explorative study dengan menggali sebanyak-banyaknya data & informasi untuk merumuskan

karakteristik khas dari subjek yang dikaji secara deskriptif. Fokus utama dalam kajian ini adalah analisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak yang didasarkan pada hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pengolahan dan analisis data hasil Survei Konsumsi Pangan Kabupaten Lebak dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menggunakan alat bantu komputer yang sistematis dan praktis dalam bentuk Aplikasi Analisis Data Survei Konsumsi Pangan yang dikembangkan atas kerjasama Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian dengan Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan data hasil Survei Konsumsi Pangan tahun 2021 sudah mencapai rata-rata konsumsi energi sekitar 2,255 kkal/kapita/hari (107,4 %AKE) dan konsumsi protein sekitar 63,4 gram/kapita/hari (111,3 %AKP). Sementara secara kualitas berdasarkan PPH konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak belum mencapai ideal, dimana pada tahun 2021 skor PPH konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Lebak baru mencapai 88,7.

Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak merupakan dampak langsung dari masih rendahnya konsumsi pada beberapa kelompok pangan strategis. Secara umum konsumsi pangan penduduk per kapita di Wilayah Kabupaten Lebak mengalami kelebihan padi-padian sebanyak 152,2 gram/hari atau 55,6 kg/tahun. Sementara kelompok pangan yang lainnya masih mengalami defisit yang signifikan, khususnya kelompok umbi-umbian sekitar 78,6 gram/hari atau 28,7 kg/tahun, pangan hewni sekitar 39,9 gram/hari atau 14, kg/tahun serta sayur dan buah sekitar 42,1 gram/hari atau 15,4 kg/tahun..

Secara umum, berdasarkan rata-rata tingkat kecukupan energi konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak sudah dapat

dikategorikan tidak rawan konsumsi pangan secara kuantitas. Proporsi rumahtangga yang sangat rawan kuantitas konsumsi pangan (TKE < 70 %AKE) juga hanya sekitar 5,2 persen. Demikian pula, didasarkan pada skor PPH konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak sudah dapat dikategorikan tidak rawan konsumsi pangan secara kualitas. Namun demikian, masih terdapat sekitar 48,5 persen penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak yang sangat rawan konsumsi kualitas pangan dengan skor PPH kurang dari 70.

Data hasil Survei Konsumsi Pangan Tahun 2021 menunjukkan bahwa berdasarkan kecukupan energi, proporsi penduduk yang sangat rawan kuantitas konsumsi pangan pada wilayah pertanian dan perkembangan wilayah sedang di Kabupaten Lebak relatif lebih banyak dibandingkan wilayah lain. Sementara berdasarkan skor PPH proporsi penduduk yang sangat rawan kualitas konsumsi pangan pada wilayah pertanian dan wilayah maju relatif lebih sedikit dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Lebak.

Secara umum, hasil analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan sinergisitas kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan. Informasi dasar tentang situasi konsumsi pangan penduduk tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder terkait pembangunan ketahanan di Wilayah Kabupaten Lebak pada setiap tahapan dan proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Hasil analisis tentang disparitas wilayah dalam konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan prioritas kegiatan maupun sasaran program-program di bidang ketahanan pangan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Wilayah

Kabupaten Lebak dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, perlu didukung dengan berbagai upaya dan kegiatan untuk mensosialisasikan dan mengadvokasikannya kepada berbagai stakeholder terkait. Berbagai strategi dan program pembangunan di bidang ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan.

Penguatan akses pangan penduduk melalui upaya peningkatan daya beli masyarakat terhadap pangan yang diimbangi dengan penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi, beragam dan berimbang harus menjadi titik berat strategi berbagai program dibidang ketahanan pangan, khususnya pada subsistem konsumsi pangan. Berbagai strategi & program pembangunan bidang ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan dengan dukungan program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta program keluarga berencana.

Kegiatan survei perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif dengan cakupan wilayah dan sampel rumahtangga yang lebih representatif dan dukungan sumberdaya manusia maupun sumberdana yang lebih memadai untuk dapat dijadikan sebagai data pendukung baseline penetapan sasaran konsumsi pangan periode RPJM yang baru. Selain itu, cakupan ruang lingkup dan variabel analisis perlu dilengkapi dengan dukungan data berbagai variabel determinan konsumsi pangan penduduk baik pada tingkatan wilayah maupun rumahtangga.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kajian Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut kegiatan Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

Kegiatan kajian ini diharapkan dapat menyajikan situasi konsumsi pangan penduduk Kabupaten Lebak selama tahun 2021. Situasi konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari ukuran kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan berdasarkan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Indikator tersebut menggambarkan pencapaian pembangunan ketahanan pangan dalam penganekaragaman konsumsi pangan penduduk.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait ketahanan pangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lebak, serta semua pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak dan Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian.

Bogor, Desember 2022

Penyusun  
Yayat Heryatno

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Analisis.....	4
C. Kegunaan Analisis.....	4
II. LANDASAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN TEORITIS .....	5
A. Landasan Hukum dan Kebijakan.....	5
B. Landasan Teoritis dan Metodologis .....	13
III. DESAIN DAN METODE ANALISIS.....	18
A. Desain dan Cakupan Analisis.....	18
B. Sumber dan Jenis Data.....	18
C. Pengolahan dan Analisis Data .....	20
IV. KEADAAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LEBAK.....	23
A. Geografis dan Agro Ekologi .....	23
B. Demografi dan Ekonomi .....	25
V. ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK .....	31
A. Pola Konsumsi Pangan Penduduk .....	31
B. Konsumsi dan Kecukupan Energi dan Protein.....	33
C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) .....	38
VI. DISPARITAS WILAYAH SITUASI KONSUMSI PANGAN .....	41
A. Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein.....	41
B. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) .....	43
C. Tingkat Kerawanan Konsumsi Pangan .....	44
VII. PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Rekomendasi.....	48
LAMPIRAN .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel II.B.1. Perbandingan Beberapa Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal .....	14
Tabel II.B.2. Susunan PPH Ideal dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan Berdasarkan Standar Ideal Nasional .....	16
Tabel III.B.1. Cakupan Wilayah dan Jumlah Rumahtangga Sampel Survei Konsumsi Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2021 .	19
Tabel V.A.1. Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021. ....	31
Tabel V.A.2. Capaian Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021. ....	32
Tabel V.B.1. Kontribusi Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.....	34
Tabel V.B.2. Kontribusi Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.....	35
Tabel V.B.3. Capaian Kecukupan Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021. ....	36
Tabel V.B.4. Capaian Kecukupan Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021. ....	37
Tabel V.C.1. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021 .....	39
Tabel VI.A.1. Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tipe Agroekologi Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021 .....	41
Tabel VI.A.2. Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tingkat Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Lebak Tahun 2021.....	42
Tabel VI.B.1. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tipe Agroekologi Wilayah Di Kabupaten Lebak Tahun 2021 .....	43
Tabel VI.B.2. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tingkat Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Lebak Tahun 2021 .....	44
Tabel VI.C.1. Sebaran Rumahtangga Berdasarkan Tingkat Kecukupan Energi dan Skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tipe Agroekologi Wilayah Di Kabupaten Lebak Tahun 2021.....	45
Tabel VI.C.2. Sebaran Rumahtangga Berdasarkan Tingkat Kecukupan Energi dan Skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tingkat Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Lebak Tahun 2021 .....	45

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi individu. Selain itu juga penting dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif. Mengingat pentingnya hal ini, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012). Oleh karena itu, bidang ketahanan pangan menjadi salah satu urusan wajib pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Ketahanan pangan terwujud apabila telah memenuhi dua aspek sekaligus. Pertama, tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Permasalahan pokok terkait ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang memegang peranan penting adalah aspek pola

konsumsi pangan masyarakat. Beberapa permasalahan konsumsi pangan antara lain adalah: (a) Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan daya beli pangan yang rendah, (b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, (c) Masih dominannya konsumsi energi yang berasal dari beras dan (d) Rendahnya kesadaran dalam penerapan sistem sanitasi dan higienis serta keamanan pangan.

Kebijakan strategis pembangunan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan masalah konsumsi pangan antara lain diarahkan pada: (1) Meningkatkan aksesibilitas rumahtangga terhadap pangan, (2) Melaksanakan diversifikasi pangan, (3) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan dan (4) Mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi. Implementasi kebijakan peningkatan aksesibilitas rumahtangga terhadap pangan ditempuh melalui: (a) Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan, (b) Peningkatan efektivitas program raskin dan (c) Penguatan lembaga pengelola pangan di pedesaan. Pelaksanaan diversifikasi konsumsi pangan dilakukan dengan: (a) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi seimbang, (b) Pengembangan teknologi pangan, dan (c) Diversifikasi usahatani dan pengembangan pangan lokal.

Salah satu jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan adalah penganekaragaman dan keamanan pangan dengan indikator konsumsi energi dan protein dengan Tingkat Kecukupan Energi (TKE) sebesar 2000 kkal/kapita/hari dan Tingkat Kecukupan Protein (TKP) sebesar 52 gr/kapita/hari serta Skor PPH 92.5 pada tahun 2019 (RPJMN 2015-2019). Perkembangan konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, konsumsi pangan penduduk merupakan pondasi ketahanan pangan yang harus selalu dipantau secara rutin oleh unit kerja ketahanan pangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk analisis perkembangan situasi konsumsi pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat dan mutu konsumsi pangan penduduk. Pada gilirannya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan perbaikan pola konsumsi dan perencanaan penyediaan kebutuhan pangan penduduk. Kegiatan pemantauan konsumsi pangan penduduk dilakukan secara berkala, baik setiap tahun, dua tahun atau tiga tahun sekali. Perkembangan pola konsumsi pangan penduduk dapat diketahui dan dipantau dengan melaksanakan survei konsumsi pangan.

Hal ini terkait dengan amanat yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Lampiran Perpres Nomor 22 tahun 2009 menunjukkan bahwa salah satu langkah operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah evaluasi dan pengendalian dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah termasuk Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik, dan lain-lain.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut di atas, pada tahun anggaran 2021, Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Lebak secara khusus telah melaksanakan kegiatan Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak. Agar data hasil Survei tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung sinergisitas kebijakan, strategi dan prioritas permbangunan di bidang ketahanan pangan, maka pada tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan pula kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan dan program bidang

ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi penduduk dan pemenuhan kebutuhan pangan wilayah menuju pencapaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan.

## **B. Tujuan Analisis**

Secara umum tujuan kajian ini adalah menganalisis Pola Pangan Harapan berdasarkan hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di wilayah Kabupaten Lebak tahun 2021. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Menganalisis disparitas situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak.

## **C. Kegunaan Analisis**

1. Tersedianya informasi tentang situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan sasaran indikator kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lebak Tahap Selanjutnya.
2. Teridentifikasinya disparitas konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak sebagai bahan perumusan strategi dan penentuan prioritas wilayah dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Lebak.

## **II. LANDASAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN TEORITIS**

### **A. Landasan Hukum dan Kebijakan**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renstra (Rencana Strategis) SKPD disusun berpedoman pada RPJMD. Renja (Rencana Kerja) SKPD merupakan penjabaran dari Renstra. Renja SKPD disusun berpedoman pada RKPD. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD merupakan penjabaran dari Renja SKPD. RKA SKPD dikompilasi menjadi RAPBD. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBD disetujui. DPA disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk setiap SKPD.

Beberapa produk hukum dan kebijakan yang menjadi dasar pertimbangan dalam kajian atau analisis terkait pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lebak antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2021);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 7);
25. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Leak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8); dan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Leak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5).

Terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi masyarakat Indonesia, maka dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Pangan merupakan kebutuhan dasar hayati bagi seluruh umat manusia di muka bumi untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu diperlukan strategi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk di suatu wilayah agar dapat hidup secara sehat dan produktif dalam rangka mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa pemenuhan pangan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Semua lapisan masyarakat wajib memperoleh pangan sehingga mampu mewujudkan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemenuhan pangan dasar bagi masyarakat juga amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pangan. Pemenuhan hak dasar atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu, "kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". Pangan juga berkait erat dengan kualitas sumberdaya manusia. Artinya, kecukupan pangan yang baik akan mendukung tercapainya status gizi yang baik. Dengan demikian akan dihasilkan generasi yang juga berkualitas.

Kebijakan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pangan juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara

adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan secara nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pangan mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa: 1) Pasal 60 Ayat 1: Pemerintah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif; 2) Pasal 60 Ayat 2: Penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; Pasal 62 : Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) menyatakan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan di kabupaten/kota mencakup 4 urusan dan 9 sub-urusan, yaitu: 1), Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian (urusan kabupaten/kota adalah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota); 2). Penyelenggaraan ketahanan

pangan urusan kabupaten/kota adalah : a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, b) pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota, c) penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, d) pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi); 3). Penanganan kerawanan pangan (urusan kabupaten/kota adalah: a) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan, b) penanganan kerawanan pangan, c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan); (4) Keamanan pangan (urusan kabupaten/kota adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar).

Mengacu pada uraian tersebut, maka penganeekaragaman konsumsi pangan termasuk kedalam salah satu jenis pelayanan dasar pembangunan bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, perkembangan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur secara lebih detail terkait dengan hal tersebut yang antara lain menjelaskan bahwa:

1. Pasal 25 : Penganeekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
  - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
  - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pasal 26 Ayat 1: Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui:
  - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
  - b. pengoptimalan pangan lokal;
  - c. dan seterusnya.
3. Pasal 27 Ayat 1 : Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
  - a. prinsip gizi seimbang;
  - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
  - c. ramah lingkungan; dan
  - d. aman.
4. Pasal 27 Ayat 2: Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a diukur dengan Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya.
5. Pasal 27 Ayat 3: Ketentuan mengenai Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

## **B. Landasan Teoritis dan Metodologis**

Pola Pangan harapan atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai "komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya". Dengan demikian, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok

pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenal sebagai Skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang gizinya.

Dalam perhitungan/penentuan PPH, pangan dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu (1) padi-padian (beras, jagung, terigu dan hasil olahannya); (2) umbi-umbian/pangan berpati (ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan hasil olahannya); (3) pangan hewani (ikan, daging, telur, susu, dan hasil olahannya); (4) minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng/kelapa sawit, dan margarin); (5) buah dan biji berminyak (kelapa, kemiri, kenari, mete, coklat); (6) kacang-kacangan (kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya); (7) gula (gula pasir, gula merah/mangkok dan sirup); (8) sayuran & buah (semua jenis sayuran & buah-buahan) (FAO-RAPA, 1989).

Tabel II.B.1. Perbandingan Beberapa Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal

No.	Kelompok Pangan	FAO-RAPA		Meneg Pangan 1994			Deptan 2001		
		%	Interval	%	Bobot	Skor	%	Bobot	Skor
1.	Padi-padian	40	40 – 60	50	0.5	25	50	0.5	25
2.	Umbi-umbian	5	0 – 8	5	0.5	2.5	6	0.5	2.5
3.	Pangan Hewani	20	5 – 20	15.3	2	30.6	12	2	24
4.	Minyak & lemak	10	5 – 15	10	1	10.0	10	0.5	5
5.	Buah/biji berminyak	3	0 – 3	3	0.5	1.5	3	0.5	1
6.	Kacang-kacangan	6	2 – 10	5	2	10.0	5	2	10
7.	Gula	8	2 – 15	6.7	0.5	3.4	5	0.5	2.5
8.	Sayur dan Buah	5	3 – 8	5	2	10.0	6	5	30
9.	Lain-lain	3	0 – 5	0	0	0.0	3	0	0
		100		100		93.0	100		100

Menurut hasil Workshop on Food and Agriculture Planning for Nutritional Adequacy di Jakarta tanggal 11-13 Oktober 1989, komposisi pangan bagi total wilayah direkomendasikan sebagai berikut : kelompok padi-padian sekitar 50%, makanan berpati sekitar 5%, pangan hewani 15-20%, minyak dan lemak lebih dari 10%, kacang-kacangan sekitar 5%, gula 6-7%, buah dan sayur 5% (FAO-MOA, 1989).

Standar perhitungan skor PPH menurut Deptan (2001) merupakan penyempurnaan dari pola pangan harapan berdasarkan anjuran FAO-RAPA (1989) dengan menerapkan sistem skor untuk penilaian konsumsi pangan berdasarkan Guthrie et al (1981), yaitu setiap kelompok pangan utama (tiga kelompok pangan utama) diberikan skor maksimum yang relatif sama, yaitu 33.3 bagi setiap kelompok pangan utama (berasal dari 100 dibagi 3). Kelompok pangan tersebut adalah (a) pangan sumber karbohidrat dan energi (sereal, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula) dengan kontribusi energi 74%; (b) pangan sumber protein/lauk-pauk (kacang-kacangan dan pangan hewani) dengan kontribusi energi 17%; (c) pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan kontribusi energi 6% dan (d) pangan lainnya (aneka minuman dan bumbu) dengan kontribusi energi 3%. Rating 0.5 diperoleh dari nilai 33.3 dibagi 74; rating 2.0 diperoleh dari nilai 33.3 dibagi 17; dan rating 5.0 diperoleh dari nilai 33.3 dibagi 6. Masing-masing hasil dibulatkan untuk kembali mendapatkan total skor PPH = 100. Tabel II.B.2 menyajikan Standar Perhitungan Skor PPH Ideal Nasional dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan.

Penyempurnaan Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal di Indonesia mengacu pada rumusan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.B.1. Beberapa pertimbangan pokok yang digunakan dalam perumusan, antara lain: (1) Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WНКPG) Tahun 1998 sebesar 2000 kkal/kapita/hari atau WНКPG Tahun 2012 sebesar 2150

kcal/kapita/hari; (2) Perubahan standar AKG dilakukan diawal periode RPJM; (3) Persentase energi untuk perhitungan skor PPH dihitung terhadap AKG; (4) Bobot disempurnakan sesuai teori rating; (5) Skor maksimum PPH adalah 100; (6) Peran pangan hewani, gula, serta sayur dan buah disesuaikan dengan PUGS; (7) Peran umbi-umbian ditingkatkan sejalan dengan kebijakan diversifikasi pangan pokok dan pengembangan pangan lokal; (8) Peran makanan lainnya terutama bumbu dan minuman lainnya tidak diabaikan; (9) Untuk Beberapa daerah yang memiliki karakteristik dan potensi wilayah serta preferensi pangan masyarakat yang dianggap spesifik diperlukan penyesuaian.

Tabel II.B.2. Susunan PPH Ideal dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan Berdasarkan Standar Ideal Nasional

No.	Kelompok Pangan	Kecukupan Energi Per Kapita		Standar Perhitungan PPH		Estimasi Berat (gr/kap/hari)
		kcal/hari	%AKE	Bobot	Skor	
1.	Padi-padian	1000	50	0.5	25	275
2.	Umbi-umbian	120	6	0.5	2.5	90
3.	Pangan Hewani	240	12	2	24	140
4.	Minyak & lemak	200	10	0.5	5	25
5.	Buah/biji berminyak	60	3	0.5	1	10
6.	Kacang-kacangan	100	5	2	10	35
7.	Gula	100	5	0.5	2.5	30
8.	Sayur dan Buah	120	6	5	30	230
9.	Lain-lain	60	3	0	0	15
		2000	100		100	

PPH berguna sebagai instrumen sederhana untuk menilai situasi situasi konsumsi pangan, berupa jumlah dan komposisi pangan menurut kelompok pangan secara agregat. Disamping itu juga berguna sebagai basis untuk perhitungan skor PPH yang digunakan sebagai indikator mutu gizi dan keragaman ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH juga berguna untuk perencanaan konsumsi dan kebutuhan pangan. Dengan pendekatan PPH, perencanaan konsumsi pangan penduduk pada tahun tahun mendatang diharapkan dapat mencapai ideal, yaitu tidak hanya memenuhi kecukupan gizi akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan

keseimbangan gizi (nutritional balance) yang didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

### **III. DESAIN DAN METODE ANALISIS**

#### **A. Desain dan Cakupan Analisis**

Desain analisis yang digunakan adalah explorative study dengan menggali sebanyak-banyaknya data & informasi untuk merumuskan karakteristik khas dari subjek yang dikaji secara deskriptif. Fokus utama dalam kajian ini adalah analisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak yang didasarkan pada hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

Kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dilaksanakan selama 3 (tiga bulan efektif) dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Adapun lingkup kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan desain analisis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: inventarisasi bahan, inventarisasi data hasil survei, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data pokok yang digunakan dalam Analisis Konsumsi dan Kebutuhan Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan di Wilayah Kabupaten Lebak ini didasarkan pada data-data hasil Survei Konsumsi Pangan (SKP) di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak. Kegiatan SKP dilaksanakan di 9 kecamatan sampel di wilayah Kabupaten Lebak yang dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) tipe agroekologi, yaitu: wilayah pertanian, wilayah perikanan, dan wilayah lainnya, dimana pada masing-masing tipe wilayah dipilih 3 kecamatan yang paling mewakili karakteristik wilayahnya. Pada masing-masing kecamatan sampel dipilih lebih lanjut sebanyak 3 desa contoh dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berbeda.

Populasi survei konsumsi pangan adalah seluruh rumahtangga yang secara *defacto* dan *dejure* menetap di wilayah survei. Pada masing-masing desa lokasi survei dipilih sebanyak 10 sampel rumahtangga secara purposive dengan mempertimbangkan representasi karakteristik demografi dan sosial ekonomi rumahtangga. Cakupan wilayah dan jumlah rumahtangga sampel pada SKP di wilayah Kabupaten Lebak disajikan pada Tabel III.B.1 dibawah.

Tabel III.B.1. Cakupan Wilayah dan Jumlah Rumahtangga Sampel Survei Konsumsi Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Cakupan/Jumlah	Keterangan	Jumlah Sampel
1	Kecamatan	Dipilih 3 kecamatan per tipe agroekologi	9
2	Desa	Dipilih 3 desa per kecamatan terpilih	27
3	Rumahtangga	Dipilih 10 rumahtangga per desa terpilih	270

Berdasarkan sumbernya data survei konsumsi pangan dibedakan menjadi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen atau sumber resmi instansi pemerintah dengan menginventarisir buku, laporan atau publikasi lainnya yang tersedia di tingkat kabupaten, kecamatan, atau desa. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pejabat berwenang di wilayah sampel atau responden Rumahtangga dan/atau observasi langsung.

Berdasarkan jenisnya data Survei Konsumsi Pangan dikelompokkan menjadi jenis data tingkat wilayah dan data tingkat rumahtangga. Data tingkat wilayah adalah data-data sekunder dan/atau primer yang merupakan hasil agregat, summary atau representatif di tingkat wilayah pada masing-masing level, yang mencakup : profile wilayah, serta konversi URT berat dan harga pangan berlaku. Data profil wilayah diperoleh dari berbagai sumber informasi statistik resmi dan terbaru yang dikeluarkan oleh dinas/intansi terkait di masing-maing tingkatan wilayah. Data konversi berat

URT dan harga pangan yang perlu dikumpulkan mencakup data : jenis pangan, satuan URT, dan berat gram serta harga rata-rata per URT yang umum digunakan untuk semua jenis pangan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah kabupaten survei pada bulan pelaksanaan survei.

Data tingkat rumahtangga adalah data-data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan/atau observasi langsung terhadap rumahtangga sampel, yang mencakup : identitas rumahtangga, karakteristik anggota, karakteristik ekonomi dan konsumsi pangan rumahtangga sampel.

### **C. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara sistematis agar dapat dikaji dan digunakan sesuai tujuan pokok kajian. Tahapan pengolahan data yang paling penting adalah editing data hasil survei. Editing data merupakan suatu proses pengelolaan data dalam rangka mempersiapkan data sebelum data dientri dan dianalisis lebih lanjut, yang meliputi : pengecekan ulang formulir dan kuesioner serta penyesuaian, dan penyeragaman nilai data terhadap semua sumber data. Editing data bertujuan untuk menghindari adanya kekeliruan data yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan, perbedaan unit atau satuan data, kesalahan konversi, dan berbagai kesalahan teknis pengumpulan dan pencatatan data oleh petugas. Proses editing data dilakukan secara simultan dengan proses rekapitulasi data hasil survei.

Pengolahan & analisis data hasil survey menggunakan alat Aplikasi Analisis Data Survei Konsumsi Pangan yang dikembangkan atas kerjasama Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian dengan Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Pengolahan dan analisis data hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan alat

Aplikasi Analisis Data Survei Konsumsi Pangan yang dikembangkan atas kerjasama Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian dengan Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Aplikasi yang digunakan dalam bentuk Spreadsheet Microsoft Excel for Windows. Agar hasil analisis menjadi lebih akurat serta memiliki kekuatan analisis dan taraf signifikansi yang baik, maka telah dilakukan cleaning terhadap data hasil entri pada aplikasi komputer.

Secara umum analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk menyajikan dan menganalisa keragaan statistik berbagai jenis variabel situasi konsumsi pangan. Parameter statistik yang banyak digunakan adalah proporsi dan rata-rata. Indikator situasi konsumsi pangan yang dianalisis mencakup aspek kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas mencakup total dan/atau rata-rata konsumsi pangan menurut jenis dan kelompok pangan, tingkat kecukupan energi dan protein, serta pencapaian skor Pola Pangan Harapan konsumsi pangan. Tingkat kecukupan energi dan protein dihitung berdasarkan perbandingan antara rata-rata per kapita konsumsi energi dan protein dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk tingkat konsumsi yang dianjurkan secara nasional. Angka Kecukupan Energi (AKE) yang digunakan adalah 2,150 kkal/kapita/hari, sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) yang digunakan adalah sebesar 57.0 gram/kapita/hari.

Tingkat kecukupan konsumsi gizi khususnya energi dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menilai situasi kerawanan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah. Adapun kriteria kerawanan konsumsi pangan menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 adalah sebagai berikut :

- a. Kurang dari 70% : sangat rawan pangan
- b. 70 – 89,9% : rawan pangan
- c. 90 – 119,9% : normal (tahan pangan)
- d. 120% keatas : berlebih / diatas AKE

Untuk menganalisis kualitas konsumsi pangan digunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor maksimal 100 yang mengacu pada standar PPH Nasional yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, dengan kontribusi energi terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah sebagai berikut : 50% padi-padian, 6 % umbi-umbian, 12 % pangan hewani, 10 % minyak dan lemak, 3 % buah/biji berminyak, 5 % kacang-kacangan, 5 % gula, 6 % sayur dan buah, dan 3 % lain-lain. Adapun langkah menghitung skor PPH konsumsi pangan penduduk adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai jumlah energi yang diperoleh dari setiap jenis pangan yang dikonsumsi
- 2) Mengelompokkan pangan kedalam 9 kelompok pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan
- 3) Menghitung nilai total dan sub total energi masing-masing kelompok pangan
- 4) Menghitung kontribusi energi berdasarkan dalam persentase masing-masing kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan sebesar 2000 kkal/kap/hari.
- 5) Mengalikan kontribusi energi dengan bobot masing-masing kelompok pangan sesuai dengan standar perhitungan PPH Ideal Nasional, sehingga diperoleh skor untuk setiap kelompok pangan.
- 6) Apabila nilai hasil perhitungan melebihi nilai ideal maka digunakan nilai ideal, dan apabila nilai hasil perhitungan kurang dari nilai ideal maka digunakan nilai hasil perhitungan sebagai skor.
- 7) Menjumlahkan skor semua kelompok pangan sehingga diketahui skor PPH konsumsi pangan.

Standar PPH Ideal Nasional dapat dijadikan pula sebagai acuan dalam mengestimasi konsumsi dan kebutuhan pangan ideal penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan kontribusi energi sesuai standar perhitungan skor PPH Ideal dan AKE nasional sebesar 2150 kkal/kapita/hari maka kontribusi



Gambar IV.A.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lebak (Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2021)

Luas Wilayah Kabupaten Lebak adalah 304.472 hektar atau 3.044,72 km<sup>2</sup> dengan ketinggian dari permukaan laut terbagi kedalam tiga level ketinggian, yakni :

- 0 — 200 meter untuk wilayah sepanjang Pantai Selatan yang meliputi kecamatan Wanasalam, Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah dan sekitarnya
- 201 — 500 meter untuk wilayah Lebak Tengah yang meliputi Kecamatan banjarsari, Cijaku, Cirinten, Cileles dan sekitarnya
- 501 — 1000 meter dan lebih untuk wilayah Lebak Timur yang meliputi Kecamatan Lebakgedong, Cibeber, Sobang, Cipanas dan sekitarnya

Kabupaten Lebak terdiri dari 28 Kecamatan dan 345 desa. Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang terdiri dari banyak kecamatan selain Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Kecamatan yang memiliki luas terkecil yakni Kecamatan Kalanganyar dengan luas 28,59 km<sup>2</sup> dan terbesar Kecamatan Cibeber dengan luas 400,96 km<sup>2</sup>.

Peningkatan tanaman pangan khususnya tanaman padi masih menjadi fokus perhatian di Kabupaten Lebak, Produktivitas pertanian masih menjadi keunggulan masyarakat khususnya petani Kabupaten Lebak terutama padi. Pada tahun ini luas panen padi sawah sebesar 103.549 ha sedangkan padi lading sebesar 13.981 ha. Luas panen komoditas tanaman pangan lainnya dari yang terbesar yakni jagung 5.994 ha, ubi kayu 988 ha, ubi jalar 279 ha, kacang tanah 189 ha, kedelai 8 ha, dan kacang hijau 2 ha.

Untuk komoditas tanaman sayuran produksi yang terbesar pada komoditas Cabai yakni sebesar 6.260 ton sedikit menurun jika di bandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 6.286 ton atau turun sebesar

0,41 persen. Tetapi untuk komoditas petsai dan tomat produksi pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni berturut-turut sebesar 1.592 ton dan 2.211 ton. Untuk komoditas petsai mengalami kenaikan sebesar 23,60 persen sedangkan tomat mengalami kenaikan sebesar 9,13 persen. Untuk komoditas tanaman sayuran lain kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan.

Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Lebak telah mengusulkan program pembangunan food estate atau lumbung pangan karena didukung lahan yang luas. Hal ini untuk menegaskan kedaulatan pangan nasional dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani setempat. Selain itu juga dapat menciptakan ketahanan pangan jangka panjang. Program ini bisa dilaksanakan diantaranya dengan cara pemberian bantuan alat dan sarana produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian, pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani, serta pengembangan pertanian berbasis korporasi dan klaster.

## **B. Demografi dan Ekonomi**

Keadaan penduduk Kabupaten Lebak pada tahun ini berjumlah 1.386.793 jiwa, yang terdiri dari 714.052 jiwa laki - laki dan 672.741 jiwa perempuan dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 6,46 persen, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,52 persen, atau terjadi kenaikan sebesar 5.94 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan penduduk pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun ini telah dilaksanakan Sensus Penduduk yang merupakan kegiatan sepuluh tahun sekali untuk mendata penduduk secara langsung, sehingga jumlah penduduk yang dihasilkan adalah perhitungan riil bukan proyeksi.

Ditinjau dari indikator kependudukan lainnya, terlihat angka kepadatan penduduk sebesar 455 jiwa per km<sup>2</sup>. Secara gender selama kurun waktu empat tahun terakhir komposisi penduduk perempuan

dengan laki - laki relatif sedikit mengalami fluktuasi, yang ditunjukkan angka sex rasio yang mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 106. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki. Pada tiga tahun sebelumnya angka sex ratio sebesar 105 persen.

Pada indikator kependudukan lainnya, komposisi penduduk berdasarkan umur digunakan untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu dan biasanya ditunjukkan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan usia tidak produktif. Secara umum struktur penduduk dibedakan menjadi struktur penduduk muda (0-14 tahun), penduduk dewasa (15-64 tahun), dan penduduk tua (lebih dari 65 tahun). Pada tahun 2021 struktur penduduk lebih di dominasi oleh penduduk dewasa sebesar 68,45 persen.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak terdapat pada usia 15 - 64 tahun sebesar 68,45 persen diikuti penduduk berusia anak - anak yakni 0 - 14 tahun sebesar 27,02 persen serta usia orangtua yakni diatas 64 tahun sebesar 4,53 persen hal ini tercermin juga apabila dilihat secara jenis kelamin. Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak bila dibandingkan dengan usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Dari perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif didapat nilai rasio ketergantungan (dependency ratio). Ratio ini menggambarkan tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila dependency ratio tinggi maka beban ketergantungan penduduk nonproduktif terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungan rendah maka beban ketergantungannya juga akan semakin rendah.

Kecamatan Rangkasbitung yang posisinya sebagai ibukota kabupaten tentu saja memiliki jumlah penduduk terbesar dan kepadatan penduduk tertinggi. Urutan kedua adalah Kecamatan Cimarga yang mempunyai

jumlah desa sebanyak 17 desa, kecamatan terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Cigemblong dengan jumlah penduduk sebanyak 21.591 jiwa dan kepadatannya rata - rata sebesar 287 jiwa per km<sup>2</sup>.

Proporsi penduduk laki-laki terbesar terdapat di Kecamatan Cigemblong, Cirinten, Leuwidamar, Cikulur, dan Curugbitung, dimana angka seks rasio nya berkisar antara 108 s.d 109 penduduk laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Sedangkan yang terkecil terdapat di Kecamatan Rangkasbitung dengan perbandingan 104 penduduk Laki - laki setiap 100 perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Lebak mengalami kenaikan menjadi sebesar 69,97 persen. TPAK merupakan proporsi angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan, dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Komposisi tenaga kerja berdasarkan tiga sektor utama didominasi oleh sektor jasa dan lainnya sebanyak 52,53%, diikuti oleh sektor pertanian sebanyak 38,88% dan sisanya adalah sektor industri sebanyak 8,58%. Bergesernya lapangan pekerjaan utama dari sektor pertanian ke sektor jasa dan lainnya salah satu alasannya adalah berkurangnya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan. Kemudian pada sektor industri juga mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data di samping terlihat angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lebak mengalami kenaikan. Hal ini di karenakan pada tahun 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan perekonomian yang berdampak di hampir disemua sektor usaha. Situasi yang mengharuskan untuk tidak banyak melakukan mobilitas mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang terhenti. Banyak pekerja yang di PHK dan dirumahkan atau dihimbau untuk dirumah saja (social distancing) sehingga hal ini menyebabkan terbatasnya penduduk untuk bekerja. Kebijakan pembatasan dalam bekerja memicu bertambahnya

angka pengangguran. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah sebagai stimulus untuk menekan angka pengangguran, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan modal usaha (UMKM) sehingga dapat membuka lapangan usaha sendiri.

IPM merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Masing-masing indeks dari komponen IPM memperlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian yang telah dilakukan selama ini di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

IPM Kabupaten Lebak pada tahun 2021 mencapai 63,91 persen yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Lebak saat ini telah mencapai 63,91 persen dari nilai maksimal. IPM Kabupaten Lebak masih berada pada urutan terbawah dari delapan kabupaten/kota yang ada di Banten. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Lebak tahun ini juga mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin di Lebak naik sebesar 0,94 poin dari tahun sebelumnya yakni 8,30 persen menjadi 9,24 persen. Kenaikan ini sebagai salah satu dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian hampir di semua sektor tidak hanya di Kabupaten Lebak tetapi di seluruh dunia. Kebijakan social distancing sebagai salah satu cara untuk menekan penyebaran virus corona membuat kegiatan perekonomian menjadi terhambat bahkan terhenti.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun ini secara kuantitatif mengalami kenaikan terlihat dari angka jumlah penduduk miskin yang meningkat sebesar 11,95 persen dari tahun sebelumnya menjadi 120.830 orang, namun sebaliknya mengalami penurunan untuk angka pengeluaran perkapita yakni sebesar Rp. 8.690.000 per kapita per tahun dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 334.509,- dan ini menempati posisi terendah dari delapan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten.

Sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi kontributor terbesar dalam menyumbang produk domestik bruto di Kabupaten Lebak yakni sebesar 7.86 Triliun rupiah (27,03 persen) sementara untuk sektor perdagangan menyumbang sebesar 3.60 Triliun rupiah (12,38 persen). Pada sektor pertanian jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya mengalami kenaikan yakni sebesar 1,11 poin, kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada sektor perdagangan yang mengalami sedikit penurunan sebesar 0,62 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Banyak sektor ekonomi terpuruk mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

Secara nominal, PDRB kabupaten Lebak pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 29,08 triliun rupiah atau mengalami penambahan sebesar Rp. 0,32 triliun rupiah. Pertambahan nominal PDRB tahun 2021 menjadi penyebab meningkatnya PDRB perkapita penduduk Lebak menjadi Rp. 22,22 juta rupiah, atau meningkat sebesar 0,14 juta rupiah. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/ daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak sepanjang tahun 2021 minus 0,88 persen atau menurun sebesar 6,43 poin dibandingkan tahun 2019. Kontraksi ini dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi Covid-19. Dari sisi lapangan usaha 8 dari 17 sektor ekonomi menyumbang kontribusi negatif. Paling parah adalah sektor pertambangan dan penggalian yang tercatat minus 7,81 persen. Diikuti sektor jasa lainnya yang mencapai minus 6,08 persen padahal pada tahun lalu sektor ini masih tumbuh 6,83 persen.



## V. ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK

### A. Pola Konsumsi Pangan Penduduk

Hasil analisis terhadap data konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan data hasil Survei Konsumsi Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2021 menunjukkan bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk sudah cukup tinggi. Sebagaimana disajikan pada Tabel V.A.1 kelompok pangan yang dikonsumsi dalam jumlah yang relatif banyak dalam satuan berat secara berturut-turut adalah kelompok padi-padian, pangan hewani, serta sayur dan buah. Sementara itu, kelompok pangan umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, dan lain-lain dikonsumsi dalam jumlah yang relatif sedikit. Buah/biji berminyak merupakan kelompok pangan yang dikonsumsi dalam jumlah yang paling sedikit.

Tabel V.A.1. Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		gram/hari	kg/tahun	Jenis Pangan	kg/tahun
1.	Padi-padian	440,9	160,9	Beras giling	149,0
2.	Umbi-umbian	15,9	5,8	Ketela Pohon	3,3
3.	Pangan Hewani	107,1	39,1	Ikan	21,0
4.	Minyak dan Lemak	22,5	8,2	Minyak Kelapa	7,3
5.	Buah/Biji Berminyak	1,7	0,6	Kelapa	1,2
6.	Kacang-kacangan	25,7	9,4	Kacang Kedelai	8,2
7.	Gula	7,3	2,7	Gula Pasir	2,4
8.	Sayur dan Buah	199,4	72,8	Sayur-Sayuran	65,1
9.	Lain-lain	2,5	0,9	Bumbu	0,1

Data yang lebih terperinci tentang rata-rata konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Lebak pada tahun 2021 dalam satuan berat per kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 1. Data yang

disajikan pada lampiran tersebut sebagaimana diringkas pada Tabel V.A.1 menunjukkan bahwa jenis-jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk di Kabupaten Lebak tahun 2021 berturut-turut untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (149,0 kg/kapita/tahun) pada kelompok padi-padian, ketela pohon (3,3 kg/kapita/tahun) untuk kelompok umbi-umbian, ikan (21,0 kg/kapita/tahun) untuk kelompok pangan hewani, minyak kelapa (7,3 kg/kapita/tahun) untuk kelompok minyak dan lemak, kelapa (1,2 kg/kapita/tahun) untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang kedelai (8,2 kg/kapita/tahun) untuk kelompok kacang-kacangan, gula pasir (2,4 kg/kapita/tahun) untuk kelompok gula, sayur-sayuran (65,1 kg/kapita/tahun) untuk kelompok sayur dan buah, dan bumbu (0,1 kg/kapita/tahun) untuk kelompok lain-lain.

Tabel V.A.2. Capaian Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Capaian Per Kapita		Ideal Per Kapita		Gap Konsumsi		
		gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	%
1.	Padi-padian	440,9	160,9	288,8	105,4	152,2	55,6	52,7
2.	Umbi-umbian	15,9	5,8	94,5	34,5	-78,6	-28,7	-83,1
3.	Pangan Hewani	107,1	39,1	147,0	53,7	-39,9	-14,6	-27,1
4.	Minyak dan Lemak	22,5	8,2	26,3	9,6	-3,8	-1,4	-14,4
5.	Buah/Biji Berminyak	1,7	0,6	10,5	3,8	-8,8	-3,2	-84,2
6.	Kacang-kacangan	25,7	9,4	36,8	13,4	-11,1	-4,0	-30,1
7.	Gula	7,3	2,7	31,5	11,5	-24,2	-8,8	-76,7
8.	Sayur dan Buah	199,4	72,8	241,5	88,1	-42,1	-15,4	-17,4
9.	Lain-lain	2,5	0,9	15,8	48,5	-13,2	-47,6	-84,0

Tabel V.A.2 menyajikan gap capaian konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak dalam satuan berat konsumsi per kelompok pangan berdasarkan data hasil Survei Konsumsi Pangan Kabupaten Lebak tahun 2021. Berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel tersebut terlihat bahwa secara umum kuantitas konsumsi pangan penduduk di

Kabupaten Lebak berdasarkan volume atau berat pangan yang dikonsumsi masih kurang dari estimasi ideal konsumsi pada sebagian besar kelompok pangan kecuali kelompok padi-padian.

Tabel V.A.2 juga menyajikan perbandingan atau gap antara rata-rata berat konsumsi per kelompok pangan dengan estimasi ideal berat konsumsi pangan untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan standar PPH Nasional. Mengacu pada data hasil Survei Konsumsi Pangan Kabupaten Lebak tahun 2021 tersebut, secara umum konsumsi pangan penduduk per kapita di Wilayah Kabupaten Lebak mengalami kelebihan padi-padian sebanyak 152,2 gram/hari atau 55,6 kg/tahun. Sementara kelompok pangan yang lainnya masih mengalami defisit yang signifikan, khususnya kelompok umbi-umbian sekitar 78,6 gram/hari atau 28,7 kg/tahun, pangan hewani sekitar 39,9 gram/hari atau 14, kg/tahun serta sayur dan buah sekitar 42,1 gram/hari atau 15,4 kg/tahun.

## **B. Konsumsi dan Kecukupan Energi dan Protein**

Ukuran jumlah dalam satuan berat pangan yang dikonsumsi penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya belum dapat menggambarkan besarnya capaian kontribusi pangan sebagai sumber zat gizi, sehingga tidak dapat menjadi ukuran untuk menganalisis capaian kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan penduduk. Oleh itu perlu dianalisis lebih jauh capaian kontribusi gizi dari masing-masing kelompok maupun jenis pangan.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.1 terlihat bahwa kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 1.587 kkal/kapita/hari (70,4 %). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi energi yang signifikan adalah pangan hewani sekitar 222 kkal/kapita/hari (9,8 %) serta minyak dan lemak sekitar 196 kkal/kapita/hari (8,7 %). Sementara kelompok umbi-umbian, buah/biji

berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusi energinya relatif kecil.

Tabel V.B.1. Kontribusi Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		kcal/kap/hari	%	Jenis Pangan	kcal/kap/hari
1.	Padi-padian	1.587	70,4	Beras giling	1.469
2.	Umbi-umbian	17	0,8	Ketela Pohon	10
3.	Pangan Hewani	222	9,8	Daging Unggas	76
4.	Minyak dan Lemak	196	8,7	Minyak Kelapa	173
5.	Buah/Biji Berminyak	11	0,5	Kelapa	6
6.	Kacang-kacangan	85	3,8	Kacang Kedelai	74
7.	Gula	27	1,2	Gula Pasir	24
8.	Sayur dan Buah	103	4,6	Buah-Buahan	58
9.	Lain-lain	8	0,3	Lainnya	6
Total		2.255	100,0		

Data yang disajikan pada Tabel V.B.1 lebih jauh menunjukkan bahwa secara umum hampir sejalan dengan pola konsumsi pangannya, jenis pangan yang paling banyak menyumbang energi pada konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Lebak pada tahun 2021 untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (1469 kkal/kapita/hari) pada kelompok padi-padian, ketela pohon (10 kkal/kapita/hari) pada kelompok umbi-umbian, daging unggas (76 kkal/kapita/hari) untuk kelompok pangan hewani, minyak kelapa (173 kkal/kapita/hari) untuk kelompok minyak dan lemak, kelapa (6 kkal/kapita/hari) untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang kedelai (74 kkal/kapita/hari) untuk kelompok kacang-kacangan, gula pasir (24 kkal/kapita/hari) untuk kelompok gula, buah-buahan (58 kkal/kapita/hari) untuk kelompok sayur dan buah, dan lainnya (6 kkal/kapita/hari) untuk kelompok lain-lain. Data yang lebih terperinci tentang rata-rata kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di

Kabupaten Lebak pada tahun 2021 per kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.2 terlihat bahwa kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 30,9 gram/kapita/hari (48,7 %). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi protein yang signifikan adalah pangan hewani sekitar 18,5 gram/kapita/hari (29,2 %) dan kacang-kacangan sekitar 9,4 gram/kapita/hari (14,8 %). Sementara kelompok umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta lain-lain memiliki kontribusi protein yang relatif kecil.

Tabel V.B.2. Kontribusi Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		gram/kap/hari	%	Jenis Pangan	gram/kap/hari
1.	Padi-padian	30,9	48,7	Beras giling	27,8
2.	Umbi-umbian	0,2	0,3	Kentang	0,1
3.	Pangan Hewani	18,5	29,2	Ikan	8,0
4.	Minyak dan Lemak	0,2	0,3	Minyak Kelapa	0,2
5.	Buah/Biji Berminyak	0,2	0,4	Kelapa	0,1
6.	Kacang-kacangan	9,4	14,8	Kacang Kedelai	8,8
7.	Gula	0,0	0,0	Gula Pasir	0,0
8.	Sayur dan Buah	3,7	5,9	Sayur-Sayuran	3,0
9.	Lain-lain	0,3	0,5	Lainnya	0,2
Total		63,4	100		

Data yang disajikan pada Tabel V.B.2 lebih jauh menunjukkan bahwa secara umum hampir sejalan dengan pola konsumsi pangannya, jenis-jenis pangan yang paling banyak menyumbang protein yang signifikan pada konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Lebak pada tahun 2021 untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (27,8

gram/kapita/hari) pada kelompok padi-padian, ikan (8,1 gram/kapita/hari) pada kelompok pangan hewani, kacang kedelai (8,8 gram/kapita/hari) pada kelompok kacang-kacangan, dan sayur-sayuran (3,0 gram/kapita/hari) pada kelompok sayur dan buah.

Tabel V.B.3. Capaian Kecukupan Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Capain Per Kapita		Ideal Per Kapita		Gap Per Tahun		
		Kkal/Hari	%AKE	Kkal/Hari	%AKE	Kkal/Hari	%AKE	%
1.	Padi-padian	1.587	75,6	1.050	50,0	537	25,6	51,2
2.	Umbi-umbian	17	0,8	126	6,0	-109	-5,2	-86,1
3.	Pangan Hewani	222	10,6	252	12,0	-30	-1,4	-12,0
4.	Minyak dan Lemak	196	9,3	210	10,0	-14	-0,7	-6,9
5.	Buah/Biji Berminyak	11	0,5	63	3,0	-52	-2,5	-83,2
6.	Kacang-kacangan	85	4,1	105	5,0	-20	-0,9	-19,0
7.	Gula	27	1,3	105	5,0	-78	-3,7	-74,6
8.	Sayur dan Buah	103	4,9	126	6,0	-23	-1,1	-17,9
9.	Lain-lain	8	0,4	63	3,0	-55	-2,6	-88,1
Total		2.255	107,4	2.100	100,0	155	7,4	7,4

Keterangan: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 kkal/kapita/hari

Berdasarkan hasil analisis data hasil Survei Konsumsi Pangan Kabupaten Lebak sebagaimana disajikan pada Tabel V.B.3, total asupan energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 baru mencapai 2.255 kkal/kapita/hari. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak sudah lebih dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berdasarkan WKNPG Tahun 2018 sebesar 2.100 Kkal/kapita/hari. Tingkat Kecukupan Energi (TKE) konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak tahun 2021 telah mencapai 107,4 %AKE.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.3 terlihat pula bahwa kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 1.587 kkal/kapita/hari (75,6 %AKE). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi terhadap kecukupan energi yang signifikan adalah minyak dan lemak sekitar 222 kkal/kapita/hari (10,6 %AKE) dan pangan hewani sekitar 196 kkal/kapita/hari (9,3 %AKE). Sementara kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusi terhadap kecukupan energinya relatif kecil.

Secara umum hampir semua kelompok pangan memiliki kontribusi energi konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan energi untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.3 secara umum dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan pola konsumsinya, maka kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak untuk semua kelompok pangan masih belum beragam dan berimbang.

Tabel V.B.4. Capaian Kecukupan Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Capain Per Kapita		Ideal Per Kapita		Gap Per Tahun		
		gram/hari	%AKP	gram/hari	%AKP	gram/hari	%AKP	%
1.	Padi-padian	30,9	54,2	28,5	50,0	2,4	4,2	8,4
2.	Umbi-umbian	0,2	0,3	3,4	6,0	-3,3	-5,7	-95,3
3.	Pangan Hewani	18,5	32,5	6,8	12,0	11,7	20,5	170,5
4.	Minyak dan Lemak	0,2	0,4	5,7	10,0	-5,5	-9,6	-96,5
5.	Buah/Biji Berminyak	0,2	0,4	1,7	3,0	-1,5	-2,6	-86,2
6.	Kacang-kacangan	9,4	16,5	2,9	5,0	6,5	11,5	229,0
7.	Gula	0,0	0,0	2,9	5,0	-2,9	-5,0	-100,0
8.	Sayur dan Buah	3,7	6,6	3,4	6,0	0,3	0,6	9,3
9.	Lain-lain	0,3	0,6	1,7	3,0	-1,4	-2,4	-81,2
Total		63,4	111,3	57,0	100,0	6,4	11,3	11,3

Keterangan: \*) Angka Kecukupan Protein (AKP) = 57 gram/kapita/hari

Berdasarkan hasil analisis data hasil Survei Konsumsi Pangan Kabupaten Lebak sebagaimana disajikan pada Tabel V.B.4, total asupan protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 baru mencapai 63,4 gram/kapita/hari. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak sudah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan secara nasional berdasarkan WKNPG Tahun 2018 sebesar 57 gram/kapita/hari. Tingkat Kecukupan Protein (TKP) berdasarkan data hasil Survei Konsumsi Pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak tahun 2021 sudah mencapai 111,3 %AKP.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.4 terlihat bahwa kontribusi kecukupan protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 30,9 gram/kapita/hari (54,2 %AKP), pangan hewani sekitar 18,5 gram/kapita/hari (32,5 %AKP), dan kacang-kacangan sekitar 9,4 gram/kapita/hari (16,5 %AKP). Sementara kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusinya terhadap kecukupan protein relatif kecil.

Sebagian besar kelompok pangan memiliki kontribusi protein konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan protein untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.4 secara umum dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan pola konsumsinya, maka kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak untuk semua kelompok pangan masih kurang beragam dan berimbang.

### **C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Analisis capaian konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah dalam rangka mengkaji pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan tidak cukup hanya ditunjukkan oleh terpenuhinya kuantitas

kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan terhadap kualitas kecukupan gizi, khususnya dinilai dari aspek komposisi atau keragaman dan mutu gizi konsumsi pangan penduduk. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis kualitas konsumsi pangan berdasarkan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) yang didasarkan pada kontribusi kecukupan konsumsi energi masing-masing kelompok pangan.

Data yang disajikan pada Tabel V.C.1 menunjukkan bahwa berdasarkan data hasil Survei Konsumsi Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2021, skor PPH konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak baru mencapai 84.8 jika didasarkan pada AKE sebesar 2.100 Kkal/kapita/hari. Dengan demikian, secara umum kualitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021 masih belum mencapai pola konsumsi pangan yang ideal berdasarkan Standar PPH Ideal Nasional dengan skor PPH 100.

Tabel V.C.1. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		Kkal	%AKE*	Bobot	Skor	%AKE kali Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.587	75,6	0,5	25,0	37,8	25,0
2.	Umbi-umbian	17	0,8	0,5	2,5	0,4	0,4
3.	Pangan Hewani	222	10,6	2,0	24,0	21,1	21,1
4.	Minyak dan Lemak	196	9,3	0,5	5,0	4,7	4,7
5.	Buah/Biji Berminyak	11	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3
6.	Kacang-kacangan	85	4,1	2,0	10,0	8,1	8,1
7.	Gula	27	1,3	0,5	2,5	0,6	0,6
8.	Sayur dan Buah	103	4,9	5,0	30,0	24,6	24,6
9.	Lain-lain	8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.255	107,4		100,0		84,8

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 Kkal/kapita/hari

\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Sebagian besar kelompok pangan memiliki kontribusi energi konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan energi untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian. Hal tersebut menyebabkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak untuk hampir semua kelompok pangan masih belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang sesuai dengan standar PPH ideal.

## **VI. DISPARITAS WILAYAH SITUASI KONSUMSI PANGAN**

Disparitas pembangunan merupakan fenomena universal, disemua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya. Disparitas pembangunan antar wilayah memang merupakan kondisi alamiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas capaian pembangunan antar wilayah, yaitu: 1) perbedaan kondisi dan potensi sumber daya alam, 2) faktor sosio demografi, 3) PDRB dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, 4) mobilitas barang dan jasa, dan 5) alokasi dana pembangunan.

### **A. Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein**

Data hasil Survei Konsumsi Pangan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel VI.A.1 menunjukkan bahwa secara kuantitas situasi konsumsi pangan penduduk yang tinggal di wilayah pertanian Kabupaten Lebak relatif lebih rendah dibandingkan wilayah perikanan dan wilayah lainnya. Penduduk yang tinggal di wilayah lainnya di Kabupaten Lebak relatif lebih baik kuantitas konsumsinya jika didasarkan pada tingkat kecukupan konsumsi energinya (2400 kkal/kapita/hari atau 114,7 %AKE) dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, penduduk yang tinggal di wilayah perikanan di Kabupaten Lebak relatif lebih baik kuantitas konsumsinya jika didasarkan pada tingkat kecukupan konsumsi proteinnya (69,7 gram/kapita/hari atau 122,3 %AKP) dibandingkan di wilayah lainnya.

Tabel VI.A.1. Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tipe Agroekologi Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Tipe Agroekologi Wilayah	Konsumsi		Kecukupan	
		Energi (kkal/kap/hari)	Protein (gram/kap/hari)	Energi*) (%AKE)	Protein**) (%AKP)
1	Wilayah Pertanian	2.131	57,4	101,5	100,8
2	Wilayah Perikanan	2.235	69,7	106,4	122,3
3	Wilayah Lainnya	2.400	63,2	114,3	110,9
Kabupaten Lebak		2.255	63,4	107,4	111,3

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 kkal/kapita/hari

\*\*\*) Angka Kecukupan Protein (AKP) = 57 gram/kapita/hari

Data hasil Survei Konsumsi Pangan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel VI.A.1 menunjukkan bahwa secara kuantitas situasi konsumsi pangan penduduk yang tinggal di wilayah perkembang sedang di Kabupaten Lebak relatif lebih rendah dibandingkan lainnya. Penduduk yang tinggal di wilayah tertinggal di Kabupaten Lebak relatif lebih baik kuantitas konsumsi pangannya jika didasarkan pada tingkat kecukupan konsumsi energinya (2400 kkal/kapita/hari atau 114,7 %AKE) dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, penduduk yang tinggal di wilayah maju di Kabupaten Lebak relatif lebih baik kuantitas konsumsi pangannya jika didasarkan pada tingkat kecukupan konsumsi proteinnya (69,7 gram/kapita/hari atau 122,3 %AKP) dibandingkan di wilayah lainnya.

Tabel VI.A.2. Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tingkat Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Tingkat Perkembangan Wilayah	Konsumsi		Kecukupan	
		Energi (kkal/kap/hari)	Protein (gram/kap/hari)	Energi*) (%AKE)	Protein**) (%AKP)
1	Wilayah Maju	2.295	63,8	109,3	111,8
2	Wilayah Sedang	2.142	62,6	102,0	109,8
3	Wilayah Tertinggal	2.328	64,0	110,9	112,2
Kabupaten Lebak		2.255	63,4	107,4	111,3

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 kkal/kapita/hari

\*\*\*) Angka Kecukupan Protein (AKP) = 57 gram/kapita/hari

## B. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Analisis disparitas konsumsi pangan penduduk antar wilayah dalam tidak cukup hanya secara kuantitas didasarkan pada tingkat kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk. Data hasil Survei Konsumsi Pangan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel VI.B.1 menunjukkan bahwa secara kualitas situasi konsumsi pangan penduduk yang tinggal di wilayah pertanian Kabupaten Lebak relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Penduduk yang tinggal di wilayah pertanian di Kabupaten Lebak relatif lebih baik kuanlitas konsumsi pangannya jika didasarkan pada skor Pola Pangan Harapan (86,6 poin) relatif lebih baik dibandingkan wilayah perikanan dan wilayah lainnya.

Tabel VI.B.1. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tipe Agroekologi Wilayah Di Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Tipe Agroekologi Wilayah	Tingkat Kecukupan Energi		Skor Pola Pangan Harapan	
		Konsumsi (kkal/kap/hari)	Kecukupan*) (%AKE)	Capaian (Poin)	Gap (Poin)
1	Wilayah Pertanian	2.131	101,5	86,6	-13,4
2	Wilayah Perikanan	2.235	106,4	80,2	-19,8
3	Wilayah Lainnya	2.400	114,3	83,7	-16,3
	Kabupaten Lebak	2.255	107,4	84,8	-15,2

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 kkal/kapita/hari

\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Hal yang cukup menarik untuk dicermati adalah situasi dimana secara kuantitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan tingkat kecukupan energi di wilayah pertanian di Kabupaten Lebak lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Namun, secara kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan skor Pola Pangan Harapan wilayah pertanian di Kabupaten Lebak ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan kualitas konsumsi pangan penduduk di wilayah lainnya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kuantitas konsumsi pangan penduduk yang lebih tinggi tidak dengan serta dapat menjamin akan lebih tinggi kualitasnya.

Data hasil Survei Konsumsi Pangan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel VI.B.2 menunjukkan bahwa secara kualitas situasi konsumsi pangan penduduk yang tinggal di wilayah maju di Kabupaten Lebak relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Penduduk yang tinggal di wilayah pertanian di Kabupaten Lebak relatif lebih baik kualitas konsumsi pangannya jika didasarkan pada skor Pola Pangan Harapan (86,6 poin) relatif lebih baik dibandingkan wilayah perikanan dan wilayah lainnya. Kualitas konsumsi pangan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya serta pengetahuan dan perilaku pangan dan gizi penduduknya.

Tabel VI.B.2. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tingkat Perkemangan Wilayah Di Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Tingkat Perkembangan Wilayah	Tingkat Kecukupan Energi		Skor Pola Pangan Harapan	
		Konsumsi (kkal/kap/hari)	Kecukupan*) (%AKE)	Capaian (Poin)	Gap (Poin)
1	Wilayah Maju	2.131	101,5	86,6	-13,4
2	Wilayah Sedang	2.235	106,4	80,2	-19,8
3	Wilayah Tertinggal	2.400	114,3	83,7	-16,3
	Kabupaten Lebak	2.255	107,4	84,8	-15,2

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 kkal/kapita/hari

\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

### C. Tingkat Kerawanan Konsumsi Pangan

Secara umum, berdasarkan rata-rata tingkat kecukupan energi konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak sudah dapat dikategorikan tidak rawan konsumsi pangan secara kuantitas. Namun demikian, kondisi tersebut diatas bukan merupakan suatu jaminan bahwa

di Wilayah Kabupaten Lebak tidak terdapat penduduk yang mengalami rawan konsumsi pangan. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.C.1 proporsi rumahtangga yang sangat rawan konsumsi pangan (TKE < 70 %AKE) juga hanya sekitar 5,2 persen. Namun demikian jika didasarkan pada skor PPH konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak sudah dapat dikategorikan tidak rawan konsumsi pangan secara kualitas. Namun demikian, masih terdapat sekitar 48,5 persen penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak yang rawan konsumsi pangan dengan skor PPH kurang dari 70.

Tael VI.C.1. Sebaran Rumahtangga Berdasarkan Tingkat Kecukupan Energi dan Skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Menurut Tipe Agroekologi Wilayah Di Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Tipe Agroekologi Wilayah	Proporsi Rumahtangga (%) Menurut Kecukupan Energi (%AKE)			Proporsi Rumahtangga (%) Berdasarkan Skor PPH		
		< 70	70 - 80	> 80	< 70	70 - 80	> 80
1.	Wilayah Pertanian	7,8	14,4	77,8	42,2	25,6	32,2
2.	Wilayah Perikanan	3,3	11,1	85,6	52,2	21,1	26,7
3.	Wilayah Lainnya	4,4	3,3	92,2	51,1	21,1	27,8
	Kaupaten Lebak	5,2	9,6	85,2	48,5	22,6	28,9

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 Kkal/kapita/hari

\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Data hasil Survei Konsumsi Pangan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel VI.C.1 juga menunjukkan bahwa berdasarkan kecukupan energi, proporsi penduduk yang rawan kuantitas konsumsi pangan (TKE < 70 %AKE) pada wilayah pertanian (7,8 %) relatif lebih banyak dibandingkan wilayah perikanan dan wilayah lainnya di Kabupaten Lebak. Sementara berdasarkan skor PPH proporsi penduduk yang rawan kualitas konsumsi pangan (PPH < 70) pada wilayah pertanian (42,2 %) relatif lebih sedikit dibandingkan wilayah perikanan dan wilayah lainnya di Kabupaten Lebak.

Tael VI.C.2. Sebaran Rumahtangga Berdasarkan Tingkat Kecukupan Energi dan Skor PPH Konsumsi Pangan

Penduduk Menurut Tingkat Perkembangan Wilayah  
Di Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Tingkat Perkembangan Wilayah	Proporsi Rumahtangga (%) Menurut Kecukupan Energi			Proporsi Rumahtangga (%) Berdasarkan Skor PPH		
		< 70	70 - 80	> 80	< 70	70 - 80	> 80
1.	Wilayah Maju	3,3	10,0	86,7	46,7	18,9	34,4
2.	Wilayah Sedang	8,9	10,0	81,1	48,9	21,1	30,0
3.	Wilayah Tertinggal	3,3	8,9	87,8	50,0	27,8	22,2
	Kaupaten Lebak	5,2	9,6	85,2	48,5	22,6	28,9

*Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 Kkal/kapita/hari*

*\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional*

Data hasil Survei Konsumsi Pangan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel VI.C.2 juga menunjukkan bahwa berdasarkan kecukupan energi, proporsi penduduk yang rawan kuantitas konsumsi pangan (TKE < 70 %AKE) pada wilayah perkembangan sedang (8,9 %) relatif lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya di Kabupaten Lebak. Sementara berdasarkan skor PPH proporsi penduduk yang rawan kualitas konsumsi pangan (PPH < 70) pada wilayah maju (46,7 %) relatif lebih sedikit dibandingkan wilayah wilayah lainnya di Kabupaten Lebak.

## VII. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan hasil Survei Konsumsi Pangan tahun 2021 sudah mencapai rata-rata konsumsi energi sekitar 2,255 kkal/kapita/hari (107,4 %AKE) dan konsumsi protein sekitar 63,4 gram/kapita/hari (111,3 %AKP). Sementara secara kualitas berdasarkan PPH konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Lebak belum mencapai ideal, dimana pada tahun 2021 skor PPH konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Lebak baru mencapai 88,7.

Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak merupakan dampak langsung dari masih rendahnya konsumsi pada beberapa kelompok pangan strategis. Secara umum konsumsi pangan penduduk per kapita di Wilayah Kabupaten Lebak mengalami kelebihan padi-padian sebanyak 152,2 gram/hari atau 55,6 kg/tahun. Sementara kelompok pangan yang lainnya masih mengalami defisit yang signifikan, khususnya kelompok umbi-umbian sekitar 78,6 gram/hari atau 28,7 kg/tahun, pangan hewni sekitar 39,9 gram/hari atau 14, kg/tahun serta sayur dan buah sekitar 42,1 gram/hari atau 15,4 kg/tahun..

Secara umum, berdasarkan rata-rata tingkat kecukupan energi konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak sudah dapat dikategorikan tidak rawan konsumsi pangan secara kuantitas. Proporsi rumah tangga yang sangat rawan kuantitas konsumsi pangan (TKE < 70 %AKE) juga hanya sekitar 5,2 persen. Demikian pula, didasarkan pada skor PPH konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak sudah dapat dikategorikan tidak rawan konsumsi pangan secara kualitas. Namun demikian, masih terdapat sekitar 48,5 persen penduduk di Wilayah

Kabupaten Lebak yang sangat rawan konsumsi kualitas pangan dengan skor PPH kurang dari 70.

Data hasil Survei Konsumsi Pangan Tahun 2021 menunjukkan bahwa berdasarkan kecukupan energi, proporsi penduduk yang sangat rawan kuantitas konsumsi pangan pada wilayah pertanian dan perkembangan wilayah sedang di Kabupaten Lebak relatif lebih banyak dibandingkan wilayah lain. Sementara berdasarkan skor PPH proporsi penduduk yang sangat rawan kualitas konsumsi pangan pada wilayah pertanian dan wilayah maju relatif lebih sedikit dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Lebak.

## **B. Rekomendasi**

Secara umum, hasil analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Hasil Survei Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan sinergisitas kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan. Informasi dasar tentang situasi konsumsi pangan penduduk tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder terkait pembangunan ketahanan di Wilayah Kabupaten Lebak pada setiap tahapan dan proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Hasil analisis tentang disparitas wilayah dalam konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Lebak juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan prioritas kegiatan maupun sasaran program-program di bidang ketahanan pangan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Lebak dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, perlu didukung dengan berbagai upaya dan kegiatan untuk mensosialisasikan dan mengadvokasikannya kepada

berbaga stakeholder terkait. Berbagai strategi dan program pembangunan di bidang ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan.

Penguatan akses pangan penduduk melalui upaya peningkatan daya beli masyarakat terhadap pangan yang diimbangi dengan penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi, beragam dan berimbang harus menjadi titik berat strategi berbagai program dibidang ketahanan pangan, khususnya pada subsistem konsumsi pangan. Berbagai strategi & program pembangunan bidang ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan dengan dukungan program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta program keluarga berencana.

Kegiatan survei perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif dengan cakupan wilayah dan sampel rumahtangga yang lebih representatif dan dukungan sumberdaya manusia maupun sumberdana yang lebih memadai untuk dapat dijadikan sebagai data pendukung baseline penetapan sasaran konsumsi pangan periode RPJM yang baru. Selain itu, cakupan ruang lingkup dan variabel analisis perlu dilengkapi dengan dukungan data berbagai variabel determinan konsumsi pangan penduduk baik pada tingkatan wilayah maupun rumahtangga.

## REFERENSI

- Bank Indonesia, 2018. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Banten Edisi Februari 2018. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Serang.
- BPS Kabupaten Lebak, 2021. Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, Rangkasbitung.
- BPS Kabupaten Lebak, 2021. Satatistik Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, Rangkasbitung.
- Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, 2014. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Rangkasbitung.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak. 2017. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2017-2019. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak. Rangkasbitung.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2018. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Serang.
- Direktorat Pengembangan Wilayah, 2017. Kajian Pengembangan Model Wilayah Investasi RKP 2016. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Nahib, I. 2013. Analisis Spasial Sebaran Ketahanan Pangan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2 Desember 2013 : 113 – 119. Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial,. Bogor.
- Pemerintah Kabupaten Lebak, 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Lebak. Rangkasbitung.
- Pemerintah Kabupaten Lebak, 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Pemerintah Kabupaten Lebak. Rangkasbitung.
- Pemerintah Kabupaten Lebak, 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Pemerintah Kabupaten Lebak. Rangkasbitung.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Rata-Rata Konsumsi Pangan Penduduk Di Kabupaten Lebak Menurut Kelompok Dan Jenis Pangan Tahun 2021

No	Kelompok Dan Jenis Pangan	Konsumsi Pangan Penduduk Per Kapita		Kontribusi Energi Per Kapita/Hari	
		gram/hari	kg/tahun	kcal	%
1.	Padi-padian	440,9	160,9	1.587,4	100,0
	- Beras giling	408,1	149,0	1.469,2	92,6
	- Jagung Pipilan	4,0	1,4	12,7	0,8
	- Tepung Terigu	28,9	10,6	105,6	6,6
2.	Umbi-umbian	15,9	5,8	17,5	100,0
	- Ketela Pohon	9,0	3,3	9,9	56,7
	- Ubi Jalar	1,1	0,4	1,1	6,5
	- Sagu	0,6	0,2	2,2	12,8
	- Kentang	5,9	2,2	4,2	24,0
	- Talas	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Pangan Hewani	107,1	39,1	221,7	100,0
	- Daging Ruminansia	9,4	3,4	19,4	8,8
	- Daging Unggas	43,4	15,8	76,0	34,3
	- Telur	33,6	12,3	49,0	22,1
	- Susu	41,3	15,1	25,2	11,4
	- Ikan	57,5	21,0	52,0	23,5
4.	Minyak dan Lemak	22,5	8,2	195,6	100,0
	- Minyak Kelapa	19,9	7,3	173,2	88,6
	- Minyak Sawit	2,3	0,8	20,5	10,5
	- Lemak	0,2	0,1	1,8	0,9
	- Minyak Lain	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	1,7	0,6	10,6	100,0
	- Kelapa	3,4	1,2	6,5	61,4
	- Kemiri	0,3	0,1	1,7	16,5
	- Biji Jambu Mete	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Melinjo	5,9	2,2	2,3	22,1
6.	Kacang-kacangan	25,7	9,4	85,1	100,0
	- Kacang Tanah	2,1	0,8	9,7	11,4
	- Kacang Kedelai	22,4	8,2	74,1	87,1
	- Kacang Hijau	0,4	0,1	1,3	1,5
	- Kacang Merah	0,0	0,0	0,1	0,1
7.	Gula	7,3	2,7	26,7	100,0
	- Gula Pasir	6,5	2,4	23,7	88,8
	- Gula Aren	0,8	0,3	3,0	11,2
	- Gula Kelapa	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sayur dan Buah	199,4	72,8	103,4	100,0
	- Sayur-Sayuran	178,4	65,1	45,6	44,1
	- Buah-Buahan	111,5	40,7	57,8	55,9
9.	Lain-lain	2,5	0,9	7,5	100,0
	- Minuman	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Bumbu	0,4	0,1	1,4	18,8
	- Lainnya	2,0	0,7	6,1	81,2

Lampiran 2. Rata-Rata Konsumsi Pangan Penduduk Di Wilayah Pertanian Kabupaten Lebak Menurut Kelompok Dan Jenis Pangan Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Pangan Penduduk Per Kapita		Kontribusi Energi Per Kapita/Hari	
		gram/hari	kg/tahun	kcal	%
1.	Padi-padian	366,5	133,8	1.319,4	100,0
	- Beras giling	332,0	121,2	1.195,3	90,6
	- Jagung Pipilan	3,4	1,2	10,8	0,8
	- Tepung Terigu	31,1	11,3	113,4	8,6
2.	Umbi-umbian	16,1	5,9	17,7	100,0
	- Ketela Pohon	10,4	3,8	11,4	64,5
	- Ubi Jalar	1,3	0,5	1,4	7,8
	- Sagu	0,7	0,3	2,6	14,7
	- Kentang	3,3	1,2	2,3	13,1
	- Talas	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Pangan Hewani	100,5	36,7	208,0	100,0
	- Daging Ruminansia	8,8	3,2	18,3	8,8
	- Daging Unggas	34,7	12,7	60,7	29,2
	- Telur	21,4	7,8	31,2	15,0
	- Susu	76,1	27,8	46,4	22,3
	- Ikan	56,8	20,7	51,3	24,7
4.	Minyak dan Lemak	37,3	13,6	324,8	100,0
	- Minyak Kelapa	35,1	12,8	305,5	94,1
	- Minyak Sawit	1,8	0,7	16,6	5,1
	- Lemak	0,3	0,1	2,7	0,8
	- Minyak Lain	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	2,0	0,7	12,6	100,0
	- Kelapa	2,1	0,8	4,1	32,1
	- Kemiri	0,7	0,3	4,8	37,8
	- Biji Jambu Mete	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Melinjo	9,6	3,5	3,8	30,1
6.	Kacang-kacangan	27,1	9,9	89,7	100,0
	- Kacang Tanah	2,3	0,9	10,6	11,8
	- Kacang Kedelai	23,4	8,5	77,4	86,2
	- Kacang Hijau	0,5	0,2	1,6	1,8
	- Kacang Merah	0,1	0,0	0,2	0,2
7.	Gula	11,3	4,1	41,2	100,0
	- Gula Pasir	10,4	3,8	37,7	91,7
	- Gula Aren	0,9	0,3	3,4	8,3
	- Gula Kelapa	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sayur dan Buah	214,7	78,4	111,3	100,0
	- Sayur-Sayuran	219,9	80,3	56,2	50,5
	- Buah-Buahan	106,3	38,8	55,1	49,5
9.	Lain-lain	2,2	0,8	6,5	100,0
	- Minuman	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Bumbu	0,2	0,1	0,6	9,1
	- Lainnya	2,0	0,7	5,9	90,9

Lampiran 3. Rata-Rata Konsumsi Pangan Penduduk Di Wilayah Perikanan Kabupaten Lebak Menurut Kelompok Dan Jenis Pangan Tahun 2021

No	Kelompok Dan Jenis Pangan	Konsumsi Pangan Penduduk Per Kapita		Kontribusi Energi Per Kapita/Hari	
		gram/hari	kg/tahun	kcal	%
1.	Padi-padian	456,7	166,7	1.644,0	100,0
	- Beras giling	434,7	158,7	1.564,8	95,2
	- Jagung Pipilan	3,6	1,3	11,4	0,7
	- Tepung Terigu	18,6	6,8	67,7	4,1
2.	Umbi-umbian	9,0	3,3	9,8	100,0
	- Ketela Pohon	6,1	2,2	6,7	68,5
	- Ubi Jalar	0,5	0,2	0,6	5,9
	- Sagu	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Kentang	3,6	1,3	2,5	25,6
	- Talas	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Pangan Hewani	127,7	46,6	264,4	100,0
	- Daging Ruminansia	6,8	2,5	14,1	5,3
	- Daging Unggas	46,1	16,8	80,8	30,5
	- Telur	53,9	19,7	78,6	29,7
	- Susu	33,4	12,2	20,3	7,7
	- Ikan	78,1	28,5	70,6	26,7
4.	Minyak dan Lemak	12,1	4,4	105,3	100,0
	- Minyak Kelapa	6,9	2,5	60,4	57,3
	- Minyak Sawit	4,9	1,8	44,5	42,3
	- Lemak	0,0	0,0	0,4	0,4
	- Minyak Lain	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,4	0,2	2,8	100,0
	- Kelapa	1,1	0,4	2,1	73,1
	- Kemiri	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Biji Jambu Mete	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Melinjo	1,9	0,7	0,8	26,9
6.	Kacang-kacangan	28,7	10,5	94,9	100,0
	- Kacang Tanah	0,9	0,3	4,0	4,2
	- Kacang Kedelai	27,0	9,9	89,4	94,2
	- Kacang Hijau	0,4	0,2	1,5	1,5
	- Kacang Merah	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Gula	6,5	2,4	23,6	100,0
	- Gula Pasir	6,2	2,3	22,7	96,1
	- Gula Aren	0,2	0,1	0,9	3,9
	- Gula Kelapa	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sayur dan Buah	152,2	55,6	78,9	100,0
	- Sayur-Sayuran	118,3	43,2	30,2	38,3
	- Buah-Buahan	93,9	34,3	48,7	61,7
9.	Lain-lain	3,8	1,4	11,3	100,0
	- Minuman	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Bumbu	0,1	0,1	0,5	4,7
	- Lainnya	3,6	1,3	10,7	95,3

Lampiran 4. Rata-Rata Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Lainnya Kabupaten Lebak Menurut Kelompok Dan Jenis Pangan Tahun 2021

No	Kelompok Dan Jenis Pangan	Konsumsi Pangan Penduduk Per Kapita		Kontribusi Energi Per Kapita/Hari	
		gram/hari	kg/tahun	kkal	%
1.	Padi-padian	499,7	182,4	1.798,8	100,0
	- Beras giling	457,6	167,0	1.647,3	91,6
	- Jagung Pipilan	5,0	1,8	15,9	0,9
	- Tepung Terigu	37,1	13,6	135,6	7,5
2.	Umbi-umbian	22,7	8,3	24,9	100,0
	- Ketela Pohon	10,6	3,9	11,6	46,5
	- Ubi Jalar	1,4	0,5	1,5	5,9
	- Sagu	1,2	0,4	4,1	16,5
	- Kentang	11,0	4,0	7,7	31,1
	- Talas	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Pangan Hewani	93,1	34,0	192,7	100,0
	- Daging Ruminansia	12,4	4,5	25,8	13,4
	- Daging Unggas	49,4	18,0	86,5	44,9
	- Telur	25,6	9,4	37,4	19,4
	- Susu	14,5	5,3	8,9	4,6
	- Ikan	37,8	13,8	34,2	17,7
4.	Minyak dan Lemak	18,0	6,6	156,6	100,0
	- Minyak Kelapa	17,7	6,5	153,8	98,2
	- Minyak Sawit	0,0	0,0	0,4	0,3
	- Lemak	0,3	0,1	2,4	1,5
	- Minyak Lain	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	2,6	0,9	70,6	100,0
	- Kelapa	7,0	2,6	14,4	20,4
	- Kemiri	0,1	0,0	55,5	78,6
	- Biji Jambu Mete	0,0	0,0	0,7	1,0
	- Melinjo	6,2	2,2	0,0	0,0
6.	Kacang-kacangan	21,3	7,8	15,2	100,0
	- Kacang Tanah	3,2	1,2	10,6	69,6
	- Kacang Kedelai	16,8	6,1	4,6	30,4
	- Kacang Hijau	0,2	0,1	0,0	0,0
	- Kacang Merah	0,0	0,0	119,9	789,0
7.	Gula	4,2	1,5	50,3	100,0
	- Gula Pasir	2,9	1,1	69,6	138,2
	- Gula Aren	1,3	0,5	4,8	9,5
	- Gula Kelapa	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sayur dan Buah	231,3	84,4	3,1	100,0
	- Sayur-Sayuran	197,0	71,9	1,7	54,3
	- Buah-Buahan	134,2	49,0	33,4	1.074,3
9.	Lain-lain	1,6	0,6	21,9	100,0
	- Minuman	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Bumbu	0,9	0,3	2,9	13,2
	- Lainnya	0,6	0,2	19,0	86,8

Lampiran 5. Tabel Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		Kkal	%AKE*	Bobot	Skor	%AKE kali Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.319	62,8	0,5	25,0	31,4	25,0
2.	Umbi-umbian	18	0,8	0,5	2,5	0,4	0,4
3.	Pangan Hewani	208	9,9	2,0	24,0	19,8	19,8
4.	Minyak dan Lemak	325	15,5	0,5	5,0	7,7	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	13	0,6	0,5	1,0	0,3	0,3
6.	Kacang-kacangan	90	4,3	2,0	10,0	8,5	8,5
7.	Gula	41	2,0	0,5	2,5	1,0	1,0
8.	Sayur dan Buah	111	5,3	5,0	30,0	26,5	26,5
9.	Lain-lain	7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.131	101,5		100,0		86,6

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 Kkal/kapita/hari

\*\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Lampiran 6. Tabel Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Di Wilayah Perikanan Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		Kkal	%AKE*	Bobot	Skor	%AKE kali Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.644	78,3	0,5	25,0	39,1	25,0
2.	Umbi-umbian	10	0,5	0,5	2,5	0,2	0,2
3.	Pangan Hewani	264	12,6	2,0	24,0	25,2	24,0
4.	Minyak dan Lemak	105	5,0	0,5	5,0	2,5	2,5
5.	Buah/Biji Berminyak	3	0,1	0,5	1,0	0,1	0,1
6.	Kacang-kacangan	95	4,5	2,0	10,0	9,0	9,0
7.	Gula	24	1,1	0,5	2,5	0,6	0,6
8.	Sayur dan Buah	79	3,8	5,0	30,0	18,8	18,8
9.	Lain-lain	11	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.235	106,4		100,0		80,2

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 Kkal/kapita/hari

\*\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Lampiran 7. Tabel Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Di Wilayah Lainnya Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		Kkal	%AKE*	Bobot	Skor	%AKE kali Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.799	85,7	0,5	25,0	42,8	25,0
2.	Umbi-umbian	25	1,2	0,5	2,5	0,6	0,6
3.	Pangan Hewani	193	9,2	2,0	24,0	18,4	18,4
4.	Minyak dan Lemak	157	7,5	0,5	5,0	3,7	3,7
5.	Buah/Biji Berminyak	16	0,8	0,5	1,0	0,4	0,4
6.	Kacang-kacangan	71	3,4	2,0	10,0	6,7	6,7
7.	Gula	15	0,7	0,5	2,5	0,4	0,4
8.	Sayur dan Buah	120	5,7	5,0	30,0	28,6	28,6
9.	Lain-lain	5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.400	114,3		100,0		83,7

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 Kkal/kapita/hari

\*\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Lampiran 8. Tabel Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Di Wilayah Maju Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		Kkal	%AKE*	Bobot	Skor	%AKE kali Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.624	77,3	0,5	25,0	38,7	25,0
2.	Umbi-umbian	15	0,7	0,5	2,5	0,4	0,4
3.	Pangan Hewani	199	9,5	2,0	24,0	18,9	18,9
4.	Minyak dan Lemak	195	9,3	0,5	5,0	4,6	4,6
5.	Buah/Biji Berminyak	12	0,6	0,5	1,0	0,3	0,3
6.	Kacang-kacangan	91	4,3	2,0	10,0	8,6	8,6
7.	Gula	38	1,8	0,5	2,5	0,9	0,9
8.	Sayur dan Buah	113	5,4	5,0	30,0	26,9	26,9
9.	Lain-lain	10	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.295	109,3		100,0		85,6

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 Kkal/kapita/hari

\*\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Lampiran 9. Tabel Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Di Wilayah Sedang Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		Kkal	%AKE*	Bobot	Skor	%AKE kali Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.461	69,6	0,5	25,0	34,8	25,0
2.	Umbi-umbian	15	0,7	0,5	2,5	0,4	0,4
3.	Pangan Hewani	235	11,2	2,0	24,0	22,4	22,4
4.	Minyak dan Lemak	209	9,9	0,5	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	10	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2
6.	Kacang-kacangan	83	3,9	2,0	10,0	7,9	7,9
7.	Gula	20	1,0	0,5	2,5	0,5	0,5
8.	Sayur dan Buah	104	4,9	5,0	30,0	24,7	24,7
9.	Lain-lain	6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.142	102,0		100,0		86,0

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 Kkal/kapita/hari

\*\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Lampiran 10. Tabel Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Di Wilayah Tertinggal Kabupaten Lebak Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		Kkal	%AKE*	Bobot	Skor	%AKE kali Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.678	79,9	0,5	25,0	39,9	25,0
2.	Umbi-umbian	22	1,0	0,5	2,5	0,5	0,5
3.	Pangan Hewani	231	11,0	2,0	24,0	22,0	22,0
4.	Minyak dan Lemak	183	8,7	0,5	5,0	4,4	4,4
5.	Buah/Biji Berminyak	10	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2
6.	Kacang-kacangan	82	3,9	2,0	10,0	7,8	7,8
7.	Gula	22	1,1	0,5	2,5	0,5	0,5
8.	Sayur dan Buah	94	4,5	5,0	30,0	22,3	22,3
9.	Lain-lain	6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.328	110,9		100,0		82,8

Ket: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 Kkal/kapita/hari

\*\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional